

PENGUATAN ENTITAS DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN (GROWTH POLE) EKONOMI DI KAWASAN PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS RIAU

Muslim¹, Muhamad Rachmadi², Larbiel Hadi³, Mhd. Rafi⁴, Muklis⁵

^{1,2,4,5} Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

³ Politeknik Negeri Bengkalis

muslim.msi@uin-suska.ac.id

Abstract

The enactment of Law no. 6 of 2014 about Villages, provides a new mindset and significant changes for village. Increasing village entities through authority and autonomy in administering government and respect for traditional rights make the current condition of the village more growing and developing. The concept of regional development is one of the right solutions in dealing with various challenges in development by determining the growth center. Determining the center of growth in an area requires a complex study. The merits of five (5) villages on Rupal Island are geographically considered to be very strategically located because they are located in the middle of the island and are located between two government areas, namely Rupal District and North Rupal District. Determining the village as the center of growth using scalogram analysis and the interaction or power of a village with other villages using gravity analysis. The results of this study recommend that Pangkalan Nyirih Village occupies Hierarchy I indicating that Pangkalan Nyirih Village is a Growth Center and has the highest interaction value in the Rupal Island Region, especially in Central Rupal.

Keywords: *Growth Center, Village Entity, Rupal Island*

Abstrak

Ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan iklim baru kepada desa dan membawa perubahan yang signifikan. Peningkatan entitas desa melalui kewenangan dan otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan serta dihormatinya hak-hak tradisional menjadikan kondisi Desa saat ini jauh lebih tumbuh dan berkembang. Konsep pengembangan wilayah, menjadi salah satu solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan dengan cara menentukan pusat pertumbuhan. Menentukan pusat pertumbuhan dalam suatu kawasan, memerlukan kajian yang kompleks dan menyeluruh. Kepatutan lima (5) Desa di Pulau Rupal secara geografis dinilai sangat strategis letaknya karena berada ditengah-tengah pulau dan berlokasi diantara dua wilayah pemerintahan yaitu Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara. Menentukan desa sebagai pusat pertumbuhan menggunakan analisa *Skalogram* dan interaksi atau daya tarik suatu Desa dengan desa lain menggunakan analisa *Gravitasi*. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa Desa Pangkalan Nyirih menempati Hierarki I menunjukkan bahwa Desa Pangkalan Nyirih merupakan Pusat Pertumbuhan dan memiliki nilai interaksi paling tinggi di Kawasan Pulau Rupal Khususnya di Rupal Tengah.

Kata kunci: *Pusat Pertumbuhan, Entitas Desa, Pulau Rupal*

PENDAHULUAN

Fenomena Desa di Indonesia telah banyak memberikan inspirasi kepada kita akan pentingnya wilayah ini menjadi objek dan subjek di dalam pembangunan. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan iklim baru kepada Desa. Peningkatan entitas desa melalui kewenangan dan otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan serta dihormatinya hak-hak tradisional dan hak-hak asal usul sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut, menempatkan desa semakin strategis dan menjadi faktor utama dalam mendorong pembangunan nasional. Apalagi dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bersumber dari APBN, APBD, PADes dan penerimaan sumber lainnya. Dengan sendirinya tentu akan memperkuat fungsi dan kedudukan desa dalam mewujudkan tujuannya yaitu, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai Program Nawacita, dimana membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sudah 5 tahun lebih kurang Otonomi Desa berjalan, tanpa disadari telah banyak membawa perubahan yang signifikan. Kondisi Desa saat ini jauh lebih tumbuh dan berkembang. Desa semakin fenomenal, karena disamping mendapatkan anugerah dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, juga mempunyai tantangan membawa misi pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan. Desa nantinya tidak tertutup kemungkinan akan dihadapkan dengan tantangan yang baru, dimana adanya persaingan antar daerah dan wilayah (*interregional competition*). Desa pasti akan tergiring dalam konstelasi itu. Oleh sebab itu, agar Desa dapat mengatasi dan bisa mewujudkan keberhasilannya dalam pembangunan, perlu memiliki daya saing lokal dan memanfaatkan kawasan maupun wilayah sebagai penopang mobilisasi perekonomiannya.

Konsep pengembangan wilayah, menjadi salah satu solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan. Alasannya ialah, pengembangan wilayah memiliki makna keseluruhan tahapan tindakan yang dilakukan dan memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada dengan tujuan untuk mendapatkan tatanan dan kondisi daerah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat. Lebih jelas, Anwar (2005) menambahkan, pengembangan wilayah dilakukan adalah untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah.

Bagi Desa, konsep maupun gagasan pengembangan wilayah kiranya sangat di perlukan dalam pembangunan. Dapat diyakini dengan adanya desentralisasi kewenangan dan tersedianya alokasi dana, akan mempermudah menggali potensi wilayah dan menjadikan basis sektor di dalam kegiatan perekonomian. Rondinelli (dalam Rustiadi. 2006) mengidentifikasi ada tiga konsep pengembangan kawasan, yakni (1) konsep pertumbuhan (*growth pole*). (2) integrasi (keterpaduan) fungsi-fungsi spasial dan (3) pendekatan desentralisasi wilayah (*decentralized territorial*). Jelas dalam kaitan ini, otonomi yang dimiliki Desa akan memberikan ruang dan peluang yang sangat besar untuk melakukan pengembangan wilayah. Desa diharapkan tidak saja menjadi stabilasator atau dinamisator pada tataran birokrasi pemerintahan, akan tetapi dalam spektrum yang lebih luas, Desa sudah semestinya melakukan integrasi dalam fungsi spasial terutama dalam menciptakan pusat pertumbuhan.

Pulau Rupat adalah sebuah kawasan pulau yang secara administratif di bawah pemerintahan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Secara geografis, wilayah ini merupakan gugusan pulau Sumatera memiliki kawasan territorial yang sebelah Utara dan Timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Pulau Bengkalis dan sebelah Barat berbatasan dengan Dumai. Wilayah ini memiliki dua Kecamatan yaitu Kecamatan Rupat dengan 16 Desa/Kelurahan dan Kecamatan Rupat Utara terdiri dari 8 Desa/Kelurahan. Luas secara keseluruhan wilayah pulau ini adalah 1500 KM persegi. Untuk menjangkau wilayah ini menggunakan transportasi laut dengan memakai jasa *speed-boat* dan Roro yang menghabiskan waktu tempuh 2 jam dari Bengkalis dan lebih kurang 30 menit dari Dumai.

Melihat secara keseluruhan potensi wilayah ini, sudah seharusnya terbentuk kawasan pusat pertumbuhan. Ini disebabkan letaknya yang amat strategis serta didukung oleh potensi ekonominya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, dengan membentuk pusat pertumbuhan, wilayah ini akan jauh lebih berkembang dan memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan mobilitas ekonomi dan produktifitas masyarakat dalam satu kawasan yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan.

Menentukan pusat pertumbuhan dalam suatu kawasan, memerlukan kajian yang kompleks dan menyeluruh. Banyak aspek yang menjadi pertimbangannya mulai dari keadaan penduduk, luas wilayah, aksesibilitas kebutuhan dasar, fasilitas pelayanan publik. Di bawah ini adalah kawasan terpilih pusat pengembangan Desa sebagai pusat pertumbuhan di Pulau Rupat.

Tabel 1. Kawasan terpilih Desa sebagai Pusat Pertumbuhan (*growth pole*)

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)
1	Pangkalan Nyirih	4.571	73.00
2	Sei. Cingam	2.368	75.35
3	Pancur Jaya	1.434	13.00
4	Dungun Baru	1.411	28.00
5	Parit Kebumen	1.396	24.00

Sumber: olahan data sekunder

Pemilihan kawasan ini untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*), telah mempertimbangkan kepatutannya berdasarkan indikator seperti: lima (5) Desa yang berada dalam wilayah ini, secara geografis dinilai sangat strategis letaknya karena berada ditengah-tengah pulau dan berlokasi diantara Dua wilayah pemerintahan yaitu Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.

Pengembangan Wilayah/Kawasan

Pengembangan wilayah merupakan solusi atas kesenjangan atau ketidakadilan dalam pembangunan. Issu ketidakadilan dalam pembangunan menurut Mubyarto (1992) meliputi:

1. Daerah yang kaya sumber daya alam tetapi masyarakatnya tidak menikmati kekayaan tersebut sehingga penduduknya tetap miskin;
2. Pusat peredaran uang di Jakarta padahal uang tersebut merupakan hasil penguasaan sumber daya alam di daerah di luar Jakarta yang penduduknya tetap miskin;
3. Seandainya penduduk yang bertempat tinggal di wilayah yang kaya sumber daya alam tetapi hanya menikmati sendiri kekayaan tersebut tanpa membaginya dengan wilayah lain.

Pengembangan wilayah merupakan keseluruhan tahapan tindakan yang dilakukan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh wilayah dengan tujuan untuk mendapatkan tatanan dan kondisi daerah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi (Anwar, 2005). Issu kesenjangan tidak hanya terjadi dalam satu lingkup provinsi saja, tetapi di lingkup wilayah yang lebih luas pun bisa terjadi, begitu juga dilingkup yang lebih kecil lagi, misalnya di kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa.

Pengembangan wilayah dapat terjadi di berbagai tingkatan termasuk di daerah, apalagi didukung dengan adanya desentralisasi kewenangan (*authority*) dan tersedianya alokasi dana,

akan mempermudah menggali potensi wilayah dan menjadikan basis sektor didalam kegiatan perekonomian. Rondinelli (2006) mengidentifikasi ada tiga konsep pengembangan kawasan, yakni:

1. Konsep pertumbuhan (*growth pole*)
2. Integrasi (keterpaduan) fungsi-fungsi spasial, dan
3. Pendekatan desentralisasi wilayah (*decentralized territorial*).

Permasalahan lain yang berkembang bersamaan dengan adanya isu mengenai kesenjangan atau ketimpangan wilayah adalah munculnya desa-desa tertinggal, yaitu desa-desa yang perkembangannya masih sangat rendah dibandingkan desa-desa lainnya (Mubyarto, 1991). Jelas dalam kaitan ini, otonomi yang dimiliki desa akan memberikan ruang dan peluang yang sangat besar untuk melakukan pengembangan wilayah. Desa diharapkan tidak saja menjadi stabilisator atau dinamisator pada tataran birokrasi pemerintahan, akan tetapi dalam spektrum yang lebih luas, Desa sudah semestinya melakukan integrasi dalam fungsi spasial terutama dalam menciptakan pusat pertumbuhan.

Pusat Pertumbuhan

Kajian ilmiah tentang pusat pertumbuhan pertama kali di populerkan oleh Francois Perroux tahun 1955, kajian ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan mayoritas ekonom yang berpendapat bahwa transfer pertumbuhan antar wilayah umumnya berjalan lancar, sehingga produksi dan kapitas serta perkembangan penduduk tidaklah selalu proporsional antar waktu. Kenyataan menunjukkan transfer pertumbuhan ekonomi dan daerah umumnya tidak lancar, akan tetapi cenderung terkonsentrasi pada daerah-dearah tertentu mempunyai keuntungan-keuntungan lokasi (Sjafrizal, 2008).

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi (baik ke dalam maupun ke luar). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*).

Menurut Sjafrizal (2008) karakteristik utama daerah pusat pertumbuhan:

1. kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu
2. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian

3. Terdapat keterkaitan *input* dan *output* yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut
4. kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industry induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut

Adapun ciri pusat pertumbuhan seperti yang dinukil oleh Tarigan (2015) meliputi:

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi;
2. Ada efek pengganda (*multiplier effect*);
3. Adanya konsentrasi geografis;
4. Bersifat mendorong wilayah belakangnya

Beberapa hal yang dapat dicapai melalui konsep pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, antara lain adalah :

1. Pendapatan daerah secara keseluruhan akan meningkat dan merata karena pendapatan di daerah pertumbuhan akan mencapai maksimal apabila pembangunan dipusatkan di pusat-pusat pertumbuhan dari pada pembangunan itu dipencar-pencar secara terpisah di seluruh daerah.
2. Penyediaan prasarana dan perumahan lebih mudah dan murah apabila dipusatkan pada titik-titik pertumbuhan
3. Titik pertumbuhan baru dapat menampung tenaga kerja sehingga persoalan pengangguran di pusat utama maupun daerah sekitarnya dapat ditanggulangi.
4. Titik-titik pertumbuhan dapat berfungsi sebagai pembendung arus pendatang ke pusat utama karena umumnya pendorong arus migrasi adalah rendahnya tingkat kehidupan. Dengan demikian arus migrasi ke pusat utama dapat dibendung di titik ini.

Konsentrasi penduduk tidak terjadi pada pusat utama saja sehingga beban kota utama dalam penyediaan fasilitas dan lapangan kerja dapat dikurangi. Dalam pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Menurut Friedman (1979) pada skala regional dikenal tiga orde, yaitu :

1. Pusat pertumbuhan primer (utama) ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya.
2. Pusat pertumbuhan sekunder (kedua) adalah pusat dari sub daerah, seringkali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh pusat utamanya dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini.

3. Pusat pertumbuhan tersier (ketiga) Pusat pertumbuhan tersier ini merupakan titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Eta Rahayu dan Eko Budi Santoso (2014) menjelaskan adanya kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Gunungkidul terlihat dari tingginya perbedaan angka kemiskinan dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta terkonsentrasinya kegiatan pada wilayah ibukota kabupaten. Untuk itu penentuan pusat-pusat pertumbuhan secara tersebar diperlukan di Kabupaten Gunung Kidul untuk meminimalisir kesenjangan yang terjadi. Penelitian lainnya ialah penelitian Imelda (2013) artikel ini mengutarakan Kota Palembang menjadi pusat pertumbuhan daerah merupakan salah satu kota metropolis di Indonesia. Secara geografis Kota Palembang sebagai letaknya memiliki lokasi yang strategis secara internasional. Jarak tempuh Palembang dengan Singapura sebagai salah satu pusat bisnis dunia sama dengan jarak tempuh Palembang menuju Jakarta, ibukota negara. Sehingga Kota Palembang memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak roda perekonomian regional kawasan barat Indonesia.

Kesenjangan terjadi antara pusat-pusat pemerintahan dengan wilayah disekitarnya khususnya di pulau-pulau terluar Indonesia, salah satunya ialah Pulau Rupa. Penelitian oleh Rudy Badrudin (1999) menyebutkan adanya kesenjangan antara pusat dan daerah dan juga antar wilayah. Keadaan seperti ini, daerah harus membuat strategi pengembangan yang jitu salah satunya ialah melalui pusat pertumbuhan di daerah-daerah untuk mengurangi distorsi sehingga merekomendasikan prospek ekonomi yang kompetitif, yaitu Pertanian, Bangunan, dan Transportasi, dan Komunikasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah merupakan penelitian terapan, dimana penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Hasil penelitian diharapkan akan dapat dipakai dan sekaligus menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan khususnya pengembangan wilayah kawasan Pusat Pertumbuhan.

Data yang dipakai diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) berupa Bengkalis dalam Angka, Rupa dalam Angka, serta dokumen resmi dan arsip pemerintahan lainnya seperti :

- a. Geografis Wilayah dan Tipologi Penduduk
- b. Potensi Wilayah
- c. Fasilitas Publik ; Sarana dan Prasarana

d. Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Menentukan Desa sebagai pusat pertumbuhan pada kawasan terpilih di pulau Rupat, menggunakan analisa *Skalogram* dimana disusun dalam bentuk tabulasi berdasarkan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing Desa dengan menggunakan formulasi :

$$k = 1 + 3,3 \text{ Log } n$$

keterangan :

k = banyaknya kelas

n = banyaknya Desa

kemudian untuk mengetahui interaksi atau daya tarik suatu Desa dengan Desa lain yang ada disekitarnya dapat diketahui dari mobilitas masyarakat atau pergerakan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan, baik masyarakat Desa A ke Desa B maupun sebaliknya, kekuatan interaksi tergantung pada jumlah penduduk dan jarak antar desa/wilayah, sehingga analisa *Gravitasi* dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$A_{ij} = k \frac{P_i - P_j}{d_{ij}^2}$$

Keterangan :

A_{ij} = besarnya interaksi wilayah i dengan wilayah j

P_i = jumlah penduduk diwilayah i dalam ribuan jiwa

P_j = jumlah penduduk diwilayah j dalam ribuan jiwa

d_{ij} = jarak dari wilayah i dengan wilayah j dalam km

k = sebuah bilangan konstanta berdasarkan pengalaman

b = pangkat dari d_{ij} yang sering digunakan $b= 2$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Orbitasi/Aksesibilitas

Data Orbitasi/Aksesibilitas ini ialah menunjukkan derajat kemudahan lokasi yang akan dituju atau dibahas dalam penelitian ini. Kawasan yang diteliti ialah tepatnya di Rupat Tengah yang merupakan kawasan pertumbuhan baru, Pulau Rupat yang terdiri dari dua kecamatan yaitu *pertama* : Kecamatan Rupat dengan ibu kotanya Batu Panjang yang menjadi pusat perdagangan dan industrial, *kedua* : Kecamatan Rupat Utara yang beribukotakan Tanjung Medang merupakan destinasi wisata dan potensi perikanan Kabupaten Bengkalis.

Kawasan pertumbuhan baru ini dapat dilihat data orbitasi/aksesibilitas sebagai berikut :

Tabel 2 Aksesibilitas

Nama Desa	Jumlah Penduduk	Luas Desa (Ha)	Jarak Dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan (Km)	Waktu Tempuh Dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan (Jam)	Jarak Dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten (Km/Mil Laut)	Waktu Tempuh Dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten (Jam)	Jarak Dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten/Kota lain terdekat (Km/Mil Laut)	Waktu Tempuh Dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten/Kota lain terdekat (Jam)
Pangkalan Nyirih	2.825	3.298	58	2	600	6,0	80	3
Sei.Cingam	2.562	7.535	60	2,5	590	5,5	85	3
Pancur Jaya	1.564	5.600	56	2	590	5,5	66	3
Dungun Baru	1.525	7.235	59	2,25	610	6,2	68	3,25
Parit Kebumen	1.591	3.200	53	2	605	6,2	80	3
Jumlah	10.067							

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Dari data ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dikawasan ini (Rupat Tengah) 10.067 Orang yang terdiri dari lima desa. Kemudian dilihat dari jarak kawasan ini ke pusat pertumbuhan yang sudah ada yaitu Batu Panjang yang merupakan ibu kota Kecamatan Rupat cukup jauh rata-rata 57 Km dengan waktu tempuh \pm 2 jam. Begitu juga akses ke Ibu kota Kabupaten Bengkalis yang terpisah pulau antara Pulau Bengkalis dengan Pulau Rupat dengan waktu tempuh \pm 6 jam. Hal yang sama juga akses ke Kota Dumai yang dipisahkan oleh Laut Dumai yang harus ditempuh menggunakan transportasi laut.

B. Analisis Skalogram

Proses analisa dimulai dari mentabulasi data fasilitas, hal ini untuk mengetahui fasilitas yang ada di masing-masing desa serta kelengkapan fasilitas yang dimiliki. Langkah in sebagai upaya menentukan lokasi pusat-pusat pertumbuhan. Adapun fasilitas yang digunakan di dalam analisa skalogram yaitu fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan dan pemerintahan. Fasilitas sosial terdiri dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, Puskesmas/Pustu, Klinik/Prakter Dokter, dan Apotik. Fasilitas pendidikan terdiri dari sekolah mulai dari jenjang TK sampai SMA (TK/Play Group, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA). Sedangkan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti Terminal/Pelabuhan, Kios/Kedai Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, Industrial, Super Market/ Swalayan/Toserba/ Mini Market, Restoran/ Rumah Makan, Pasar/Toko/ Warung Kelontong, Hotel/Penginapan/Homestay, Bank (Kantor Pusat/ Cabang/ Capem), Agen Bank/Link, dan BUMDes/Koperasi/KUD

Selanjutnya dari tabulasi data fasilitas ditentukanlah besaran Kapasitas, Pembobotan, Standarisasi dan diakhiri dengan penentuan hirarki dari desa di kawasan Pulau Rupert. Analisa Skalogram dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3. Hierarki Pusat Pertumbuhan Kawasan Pulau Rupert Tengah

Nama Desa	Jumlah Penduduk	IPD	Jumlah Jenis Fasilitas	Jumlah Unit Fasilitas	Hierarki
Pangkalan Nyirih	2.825	36,35455	15	142	Hierarki1
Sei.Cingam	2.562	19,14683	12	44	Hierarki3
Pancur Jaya	1.564	24,55696	9	33	Hierarki3
Dungun Baru	1.525	18,36806	8	30	Hierarki3
Parit Kebumen	1.591	31,6032	13	44	Hierarki2

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan hasil analisa skalogram diketahui hierarki masing-masing desa di kawasan Pulau Rupert Tengah. Desa Pangkalan Nyirih yang menempati Hierarki1 menunjukkan bahwa Desa Pangkalan Nyirih merupakan Pusat Pertumbuhan di Kawasan Pulau Rupert Khususnya di Rupert Tengah. Kemudian di ikuti oleh Desa Parit Kebumen menempati Hierarki2 berperan sebagai desa Penyangga I (*hinterland*), sedangkan Desa Sei. Cingam dan Dungun Baru berada di Hierarki3 sebagai desa Penyangga II (*hinterland*).

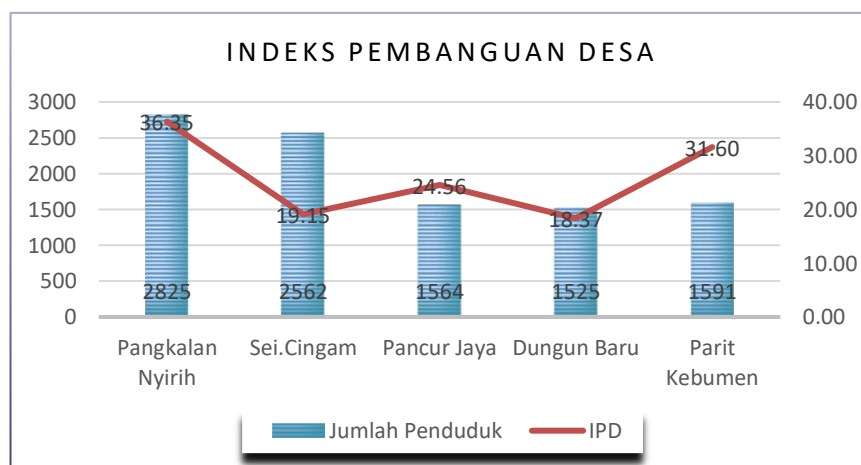
Hasil perhitungan tersebut, Desa Pangkalan Nyirih tampil sebagai Pusat Pertumbuhan di Kawasan Pulau Rupert Khususnya di Rupert Tengah memenuhi kriteria dan ciri sebagai pusat pertumbuhan seperti apa yang dinukil oleh Tarigan (2007) meliputi: adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, ada efek pengganda (*multiplier effect*), adanya konsentrasi geografis, bersifat mendorong wilayah belakangnya. Diperkuat dengan terdapatnya konsentrasi kegiatan ekonomi di Desa Pangkalan Nyirih seperti pasar, pelayanan perbankan (BRI) dan pelabuhan laut (pelabuhan Speed Boad) dimana terkonsentrasinya kegiatan ekonomi ini mampu juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi desa di sekitaran Desa Pangkalan Nyirih.

Selanjutnya bahwa fasilitas/infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal ini pernah diungkapkan oleh Srinivasu (dalam Endang Sri Utari, 2015) bahwa infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap

pengurangan kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan perampasan di suatu negara. Akses yang lebih besar dari masyarakat miskin terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, air dan sanitasi, jaringan jalan dan listrik dibutuhkan dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan sosial.

Selain itu fasilitas infrastruktur dapat memainkan peran penting dalam pengembangan wilayah (Kateja dan Maurya, 2011). Namun, ketika aspek peningkatan utilitas infrastruktur diabaikan, maka akan berpengaruh pada efek pertumbuhan menjadi lebih kecil dan efek distribusinya hampir tidak ada (Gibson dan Rioja, 2014). Dalam konteks ini, adanya ketimpangan investasi dan infrastruktur akan berperan terhadap ketimpangan ekonomi (PDRB per kapita) antarwilayah di Indonesia.

Kemudian Desa Pangkalan Nyirih memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) tertinggi di kawasan Pulau Rupa khususnya di Rupa Tengah, seperti gambar berikut ini :



Indeks Pembangunan Desa (IPD) Desa Pangkalan Nyirih menempati angka tertinggi, diikuti secara berurutan oleh Desa Parit Kebumen, Pancur Jaya, Sei. Cingam dan Dungun Baru. Lima Desa ini dicanangkan sebagai lokasi pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Pengembangan Pulau Rupa khususnya pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dicanangkan oleh Depnakertrans. Menurut Dirjen Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) Depnakertrans saat ia berkunjung ke pulau Rupa (tanggal 8 Oktober 2010), bahwa pembangunan KTM yang berada di kawasan perbatasan dilakukan untuk menegaskan kedaulatan bangsa, sehingga tidak diklaim oleh negara lain. Tujuan lain untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (Abd. Ghofur, 2014).

C. Analisa Gravitasi

Dalam hal menentukan interaksi antar desa, penulis menggunakan *Model Gravitasi*. Model ini paling banyak dipakai untuk melihat besaran daya tarik suatu desa/kawasan dengan desa/kawasan lainnya. Hasil dari formulasi model gravitasi ini di tuangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Nilai Interaksi

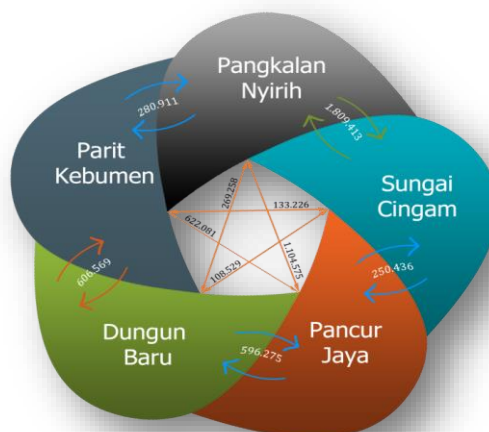
Nama Desa	Jumlah Penduduk	Nilai Interaksi (Satuan Daya Tarik)	Peringkat
Pangkalan Nyirih	2.825	3.464.156	1
Sei.Cingam	2.562	2.281.603	3
Pancur Jaya	1.564	2.573.367	2
Dungun Baru	1.525	2.094.183	4
Parit Kebumen	1.591	1.622.787	5

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Desa Pangkalan Nyirih merupakan desa yang memiliki nilai interaksi paling tinggi, hal ini disebabkan oleh ketersediaan fasilitas yang menjadi daya tarik bagi interaksi masyarakat seperti terdapatnya Kantor Bank Cabang Pembantu (BRI) dimana satu-satunya di kawasan Pulau Rukat Tengah, terdapat juga pelabuhan Speed Boat yang menghubungkan antara Pulau Rukat Tengah dengan Kota Dumai dan Pulau Bengkalis, serta fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan setara SMA dan fasilitas kesehatan berupa Klinik Praktek Dokter Umum.

Adapun model interaksi masing-masing desa di kawasan Pulau Rukat khususnya Rukat Tengah seperti berikut :

Gambar Model Interaksi



Diketahui bahwa masing-masing desa memiliki interaksi dengan desa sekitarnya dengan kekuatan interaksi yang berbeda. Desa Sei. Cingam kekuatan interaksi yang paling kuat kepada Desa Pangkalan Nyirih dengan nilai 1.809.413 satuan daya tarik, hal yang sama juga dialami oleh Desa Pancur Jaya interaksi yang paling kuat yaitu kepada Desa Pangkalan Nyirih dengan nilai 1.104.575 satuan daya tarik. Faktor utama yang menyebabkan besarnya interaksi dua desa tersebut ke Desa Pangkalan Nyirih karena keduanya berbatasan langsung dengan Desa Pangkalan Nyirih dan kebutuhan masyarakat banyak tersedia di Desa Pangkalan Nyirih.

Sedangkan Desa Dungun Baru, interaksi paling kuat terlihat kepada Desa Parit Kebumen dengan nilai 606.569 satuan daya tarik. Hal ini disebabkan akses yang lebih mudah untuk dilalui yaitu ke Desa Parit Kebumen dibandingkan dengan desa lainnya. Sedangkan Desa Parit Kebumen banyak melakukan interaksi ke Desa Pancur Jaya dengan nilai 622.081 daya tarik, disamping desa tersebut bersebelahan ditambah lagi kebutuhan yang tidak tersedia di Desa Parit Kebumen, masyarakat bisa dapatkan di Desa Pancur Jaya seperti pelayanan kesehatan dalam bentuk Klinik Praktek Dokter.

SIMPULAN

Adapun Simpulan dari penelitian ini ialah bahwa Desa yang memenuhi kriteria sebagai desa pusat pertumbuhan di kawasan Pulau Rupaat khusus di Rupaat Tengah ialah Desa Pangkalan Nyirih yang menempati **Hierarki1** dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 36,35455 menunjukkan bahwa Desa Pangkalan Nyirih merupakan Pusat Pertumbuhan di Kawasan Pulau Rupaat Khususnya di Rupaat Tengah. Kemudian di ikuti oleh Desa Parit Kebumen menempati **Hierarki2** dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 31,6032 berperan sebagai desa Penyangga I (*hinterland*), sedangkan Desa Pancur Jaya dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 24,55696, diikuti oleh Desa Sei. Cingam dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 19,14683 dan Dungun Baru dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 18,36806 berada di **Hierarki3** sebagai desa Penyangga II (*hinterland*). Sedangkan Interaksi antar desa dari hasil perhitungan dengan pendekatan *Model Gravitasi* menunjukkan bahwa Desa Pangkalan Nyirih menduduki peringkat pertama kemudian diikuti secara berurutan oleh Pancur Jaya, Sei. Cingan, Dungun Batu, dan terakhir Parit.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Tinjauan Kritis*. Bogor : P4W Press.

- Endang Sri Utari. 2015. *Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman Di Kota Yogyakarta Tahun 2014*. Journal of Economics and Policy. Jejak 8 (1) (2015): 1-88. DOI: 10.15294/jejak.v7i1.
- Eta Rahayu dan Eko Budi Santoso, 2014. *Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunungkidul*, JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539
- Friedman ,John and Clyde Weaver. 1979. *Territory and Function: the Evolution of Regional Planning*. Berkeley: University of California Press.
- Gibson, J., & Rioja, F. (2014). *A bridge to equality: How investing in infrastructure affects the distribution of wealth*. Retrieved from <https://www.frbatlanta.org/-/media/documents/news/conferences/2014/SIDE-workshop/papers/Gibson-Rioja.pdf>.
- Imelda, 2013. *Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Daerah Hinterland Kota Palembang*, Jurnal Ekonomi Pembangun Volume 11, No.1 Tahun 2013.
- Kateja, A., & Maurya, N. (2011). Inequality in infrastructure and economic development: Interrelationship reexamined. The Indian Economic Journal, 58(4), 111–127. doi:10.1177/0019466220110407.
- Mubyarto. 1991. *Strategi Pembangunan Perdesaan*. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Rudy Badrudin, 1999. *Pengembangan Wilayah Propinsi DIY (Pendekatan Teoritis)*, jurnal Economic Journal of Emerging Markets (EJEM) ISSN : 1410 – 2641 Universitas Islam Indonesia.
- Rustiadi. Ernani (ed.). 2006. *Kawasan Agropolitan Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang*. IPB Universitas Baranangsiang, Bogor
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.
- Tarigan, Robinson. 2015. *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Revisi)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional